

NASIONAL

Menteri LH Tegaskan
Penegakan Hukum Berorientasi
Pulihkan Ruang Hidup Rakyat
Halaman 2

BOLA

Como Vs MU :
Malam Spesial Nico Paz
Halaman 12

HARIAN MERDEKA

KAMIS, 22 OKTOBER 2026

ASPIRASI RAKYAT

Rp. 15.000 | TERBIT SORE

www.harian-merdeka.com



Survei Matriks Politik:

Pigai, Nusron, dan Dody Masuk Daftar Menteri Terburuk

JAKARTA | **Harian Merdeka** — Lembaga survei Matriks Politik Indonesia merilis hasil survei evaluasi dua tahun Kabinet Merah Putih pada Rabu (21/10/2026). Hasil survei itu menempatkan Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam daftar menteri dengan kinerja terburuk.

Halaman 11



Sidang Kabinet Paripurna: Prabowo Soroti MSCI, Karhutla, dan Koalisi Gemuk

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10). Dalam taklimatnya, Prabowo menyinggung banyak hal, mulai dari aspek politik hingga ekonomi terkait Indonesia.

Prabowo pun menyanjung kinerja jajarannya yang disebut cukup memuaskan dalam dua tahun pertama kepemimpinannya ini. Ia mengatakan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinannya telah bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia.

Prabowo menyebut selama dua tahun pemerintahannya diterpa tantangan yang cukup berat. Beberapa tantangan itu, kata Prabowo, di antaranya dinamika global--konflik perang terbuka hingga perang dagang.

"Saya sebagai pemimpin saudara-saudara, saya sebagai yang diberi mandat oleh rakyat, saya merasa bahwa saudara-saudara sebagai pembantu-pembantu inti saya jalankan tugas untuk bangsa dan rakyat. Saya merasa bahwa saudara-saudara telah bekerja dengan sangat keras," kata Prabowo.

Respons Koalisi Gemuk

Dalam pidatonya, Prabowo mengakui bahwa koalisi politiknya sangat gemuk. Ia beralasan hal itu karena jalan politiknya yang hendak merangkul seluruh kekuatan untuk bersatu demi kepentingan bangsa.

"Koalisi kita besar, benar, karena saya ingin sebanyak mungkin kekuatan bersatu untuk jalankan perbaikan kehidupan rakyat kita," kata Prabowo. ● (Egi)

Menteri LH Tegaskan Penegakan Hukum Berorientasi Pulihkan Ruang Hidup Rakyat



BALI |
Harian Merdeka

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Moh Jumhur Hidayat mengatakan langkah penegakan hukum lingkungan harus disertai juga dengan kewajiban pemulihan ekosistem yang rusak.

Dalam keterangan dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat mengatakan keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari sanksi yang dijatuhkan di pengadilan, melainkan dari pulihnya fungsi lingkungan yang rusak.

"Alam tidak dapat bersaksi di ruang sidang. Sungai tidak bisa melapor, hutan tidak bisa menggugat, dan terumbu karang tidak bisa mengangkat sumpah. Para ahli lah yang menjadi suara merdeka. Hukum tanpa sains

akan buta, dan sains tanpa hukum akan lumpuh," kata Menteri LH Jumhur.

Berbicara setelah membuka Forum Ahli Lingkungan Hidup Tahun 2026 yang dibuka secara resmi di Bali, Selasa (20/10), Jumhur menekankan bahwa pembuktian ilmiah merupakan fondasi mutlak dalam mengungkap fakta kerusakan lingkungan.

Para ahli dinilai memegang peran vital sebagai penyedia data dan analisis obyektif yang menjembatani sains dengan ranah yudisial.

Dia menjelaskan sebagai manifestasi nyata dari penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan, negara telah mengambil langkah tegas pada awal 2026, dengan mengajukan gugatan terhadap enam perusahaan atas dugaan kerusakan lingkungan seluas lebih dari 2.500 hektare di Sumatera Utara, den-

gan nilai gugatan sekitar Rp4,8 triliun.

KLH/BPLH menghormati penuh proses peradilan yang berjalan dengan keyakinan bahwa muara dari setiap penegakan hukum adalah pulihnya ruang hidup masyarakat dan ekosistem.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Prof Hamdi mengingatkan bahwa proses peradilan lingkungan harus berorientasi jangka panjang dan menyentuh akar permasalahan secara komprehensif.

"Tema yang kita angkat hari ini mengandung pesan mendasar. Penegakan hukum lingkungan tidak cukup berhenti pada ditemukannya pelanggaran dan dijatuhkannya sanksi. Kita juga harus memastikan bahwa lingkungan yang rusak dapat dipulihkan," katanya.

● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiho Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp:081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Aktivist Desak Prabowo Evaluasi dan Penguatan Agenda Pembangunan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Memperingati dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 98 Resolution Network menyampaikan pandangan terkait perjalanan pemerintahan, program-program strategis nasional, serta pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika politik dan ketidakpastian global.

Sekretaris Jenderal All Cipayung Nusantara, Achmad Suhawi, menyatakan bahwa pelaksanaan program pemerintahan perlu dilihat secara objektif di tengah arus informasi digital yang cepat berkembang. Ia mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik dan mengaburkan substansi kebijakan pemerintah.

"Di tengah kondisi global yang tidak menentu, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Karena itu, masyarakat perlu

sikapi setiap informasi secara kritis dan mengedepankan fakta. Perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan data," ujar Achmad Suhawi, Rabu (21/10/2026)

Sementara itu, Ketua Umum All Cipayung Nusantara, David Pajung, menilai kesinambungan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu faktor penting untuk menjaga arah pelaksanaan program pemerintahan. Ia berharap berbagai agenda pembangunan yang telah dirancang dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

David juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas kepemimpinan nasional agar pelaksanaan program strategis pemerintah berjalan secara optimal. Menurutnya, dinamika politik seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari tujuan utama pemerintahan, yaitu



meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi pembangunan nasional.

"Dua tahun pemerintahan merupakan momentum untuk mengevaluasi perjalanan sekaligus memperkuat komitmen terhadap agenda pembangunan. Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat terus menjaga soliditas kepemimpinan, memperkuat koordinasi, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tegas David Pajung.

Lebih lanjut, 98 Resolution

Network menempatkan momentum dua tahun pemerintahan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan generasi muda. Keterlibatan publik dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dua tahun pemerintahan harus menjadi pemicu untuk melanjutkan pembangunan, memperbaiki kekurangan, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama setiap kebijakan negara. ● (Egi)

Tingkatkan Keamanan Pangan, BGN Pasang AI dan CCTV Terpusat di Dapur MBG

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menguji sistem pengawasan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghubungkan kamera CCTV ke pusat pemantauan. Dalam uji coba ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) digunakan untuk membantu memantau penerapan standar operasional prosedur (SOP).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, uji coba tersebut melibatkan sekitar 70 dapur. Sistem ini diharapkan memungkinkan pemantauan kegiatan operasional dapur dilakukan secara lebih terpusat, tidak hanya mengandalkan rekaman yang dikelola masing-masing pengelola.

"Jadi semua dapur itu sudah punya CCTV, hanya CCTV-nya belum (terkoneksi), hanya



dikonsumsi oleh internal dari dapur itu. Sehingga kami sedang piloting, ada sekitar 70-an dapur yang kita piloting, untuk CCTV-nya kita tarik ke pusat, kita kasih artificial intelligence, sehingga kita bisa memonitor SOP. Apakah SOP pengolahan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, dan sebagainya," kata Sudaryono.

Pengawasan yang dirancang

mencakup sejumlah tahapan operasional, mulai dari persiapan bahan dan pengolahan makanan hingga pencucian ompreng. Pemantauan tersebut ditujukan untuk membantu memastikan prosedur yang telah ditetapkan dijalankan sesuai ketentuan.

Meski demikian, sistem pemantauan terpusat ini masih dalam tahap uji coba. Sudaryono belum menyatakan bahwa seluruh dapur MBG telah terhubung dengan pusat atau bahwa pemantauan berbasis AI sudah diterapkan secara menyeluruh.

Penguatan pengawasan melalui teknologi menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membenahi pelaksanaan MBG, terutama terkait keamanan pangan dan mutu makanan. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan evaluasi metode penyajian, tata kelola dapur, serta penert-

iban data penerima manfaat.

Salah satu pendekatan lain yang sedang diuji adalah penyajian makanan dengan metode prasmanan. Pemerintah mencoba metode tersebut di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi.

Melalui metode ini, makanan dibawa dalam kondisi hangat dari dapur untuk disajikan langsung kepada siswa di kelas. BGN berharap waktu tunggu yang lebih singkat dapat menjaga makanan tetap segar dan mengurangi risiko kerusakan yang berpotensi mengganggu kesehatan.

Sudaryono juga menyebut metode prasmanan berpeluang mengurangi sisa makanan karena siswa dapat mengambil tambahan apabila makanan masih tersedia. Namun, hasil uji coba tetap akan dievaluasi sebelum penerapannya diperluas. ● (Egi)

Hadiri Hari Santri di Riau, Cak Imin Tekankan Tiga Pesan Utama untuk Pesantren

PEKANBARU |
Harian Merdeka

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. mendorong santri mengambil peran lebih besar dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan Muhaimin saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Dar El Hikmah, Pekanbaru, Kamis (22/10/2026).

Menurut Muhaimin, tantangan santri saat ini tidak cukup dijawab dengan penguatan karakter dan pemahaman agama. Generasi pesantren juga dituntut menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi.

"Santri harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan bangsa, terutama kemiskinan, ketertinggalan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia," ucap Muhaimin.

Muhaimin, yang juga dikenal sebagai Panglima Santri, menilai Indonesia membutuhkan generasi yang berintegritas sekaligus mampu menghadapi persaingan global. Dalam situasi ekonomi dunia yang dinamis dan tantangan geopolitik yang semakin kompleks, kemandirian nasional perlu ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Namun, harapan tersebut juga menuntut penguatan pendidikan pesantren agar tidak hanya berorientasi pada pembentukan



karakter, tetapi turut membuka akses santri terhadap kompetensi profesional, kewirausahaan, dan penguasaan teknologi.

Dalam momentum Hari Santri Nasional, Muhaimin menekankan tiga hal yang harus menjadi pegangan keluarga besar pesantren:

Santri harus menjaga persatuan umat sekaligus memperkuat kebangsaan di tengah keberagaman.

Santri perlu terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Santri, kiai, dan ulama harus menunjukkan keteladanan melalui perilaku serta pengabdian nyata kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan, makna santri tidak terbatas pada mereka yang masih menempuh pendidikan di pondok pesantren. Para alumni yang membawa nilai-nilai pesantren ke berbagai bidang pekerjaan dan pengabdian juga memiliki tanggung jawab dalam pembangunan bangsa.

Dengan cakupan tersebut, kontribusi santri diharapkan semakin luas, mulai dari pendidikan, kegiatan sosial, pengembangan ekonomi masyarakat hingga kepemimpinan publik.

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu tantan-

gan yang disoroti dalam pidato Muhaimin. Menurut dia, pembangunan nasional perlu diiringi upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh kehidupan yang lebih layak. Di sinilah pesantren dinilai memiliki peluang strategis untuk berkontribusi, terutama melalui pendidikan yang mampu menghubungkan nilai moral dengan kecakapan praktis.

Muhaimin turut mengapresiasi peran ulama, kiai, dan pengasuh pesantren dalam mendidik generasi muda. Lembaga pendidikan berbasis pesantren dinilai memiliki kontribusi penting dalam membangun karakter sekaligus menyiapkan calon pemimpin masa depan.

Pemerintah, menurut Muhaimin, mendorong transformasi pendidikan pesantren melalui penguatan infrastruktur, perbaikan sistem pendidikan, dan dukungan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Dalam acara tersebut, turut hadir Bupati Inhu Ade Agus Hartanto, Bupati Kepulauan Meranti Asmar, sejumlah tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta undangan lainnya.

● (Egi)

Yusril Nilai Usulan Revisi Definisi Korupsi Layak Dipertimbangkan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai usulan revisi definisi korupsi berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) layak dipertimbangkan.

Hal tersebut disampaikan Yusril di Jakarta, Rabu (21/10), menyusul pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden mengenai perlunya penyesuaian definisi korupsi dengan standar internasional.

Penyesuaian tersebut mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pemberantasan Korupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC).

Usulan itu menjadi bagian dari pembahasan mengenai keselarasan ketentuan hukum nasional dengan standar internasional dalam upaya pemberantasan korupsi.

Meski demikian, revisi definisi korupsi perlu dikaji secara cermat agar penerapannya tetap memberikan kepastian hukum dan mendukung upaya pencegahan serta penindakan tindak pidana korupsi. ● (hmi)



70 Ribu Balita Kena ISPA Imbas Karhutla, Puan Minta Bebas Biaya Berobat



JAKARTA |
Harian Merdeka

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti 70 ribu lebih balita yang terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Puan menegaskan pentingnya perlindungan kesehatan bagi anak-anak.

“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Puan meminta pemerintah segera selesaikan persoalan Karhutla sebab dampaknya sudah meluas. Dirinya menyebut para orang tua paati ingin anak-anaknya beraktivitas dengan normal.

“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” ucapnya.

“Setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kem-

bali bermain. Harapan yang sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan,” tambah dia.

Puan meminta pemerintah fokus memberikan perlindungan bagi anak-anak selain berupaya memadamkan api. Anak-anak, menurutnya, perlu dijamin kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik.

“Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tuturnya.

Ketua DPP PDIP ini mendorong pemerintah mendengarkan keluarga terdampak karhutla sebagai dasar pemberian bantuan penanganan. Pemerintah diminta memberikan penjelasan yang transparan terkait

langkah pertolongan bagi anak-anak yang terdampak karhutla.

“Informasi harus membantu keluarga memahami keadaan serta pilihan pertolongan, dengan tetap menjaga harapan dan menghindari kesimpulan tentang masa depan anak yang belum didukung pemeriksaan,” sebutnya.

Selain itu, Puan menilai perlunya ada intervensi untuk menyediakan dukungan alat medis. Tak hanya itu, diharapkan pemerintah membantu biaya pengobatan korban Karhutla.

“Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” sebutnya.

“Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan bantuan kepada para orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Kemudian dukungan untuk tenaga kesehatan, serta petugas dan relawan

yang terus membantu penanganan Karhutla,” tambah dia.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per 18 Oktober 2026 pukul 10.00, jumlah kumulatif kasus ISPA kini mencapai 306.309 kasus, dari semula 277.075 di Rabu (14/10).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 69.015 kasus dialami balita berusia 0 hingga 5 tahun. Sementara itu, kelompok anak-anak berusia 6 hingga 9 tahun yang terdampak ISPA tercatat 77.022 kasus dan kelompok lanjut usia (lansia) sebanyak 49.680 kasus. Data Kemenkes RI juga mencatat 22 kasus ISPA pada kelompok pengidap asma.

Penambahan kasus harian ISPA di wilayah terdampak karhutla tercatat sebanyak 2.778 kasus pada 17 Oktober 2026. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan penambahan kasus pada 16 Oktober yang mencapai 2.808 kasus.

● (Egi)

Buka Musrenbang HAM, Komisi XIII DPR Minta Kebijakan Tak Cuma Kejar Ekonomi

JAKARTA |
Harian Merdeka

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan hak asasi manusia (HAM) harus menjadi spirit utama dalam pembangunan Indonesia.

Hal itu disampaikan Willy saat menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

“Harus menjadikan tadi hak asasi manusia sebagai zeitgeist, sebagai spirit, sebagai elan untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, berdaulat,” kata Willy dalam sambutannya.



Dengan menggunakan istilah zeitgeist atau semangat zaman, Willy menempatkan HAM bukan sekadar sebagai isu sektoral, melainkan nilai yang

perlu menjiwai arah pembangunan nasional.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perspektif HAM masuk dalam proses

perencanaan pembangunan sehingga orientasi pembangunan tidak hanya bertumpu pada capaian ekonomi, tetapi juga keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Musrenbang HAM 2026 digelar Kementerian Hak Asasi Manusia pada 21–23 Oktober 2026 dengan tema “Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM yang Partisipatif, Responsif, dan Antisipatif.” Forum tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi dan menyelaraskan kebijakan dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

Pembukaan Musrenbang HAM juga dirangkaikan dengan Kick Off Rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia ke-78, Rakor Penggerak HAM, serta Tasyakuran Hari Bhakti Kementerian HAM Tahun 2026. ● (Egi)

Jerat Suap HGB Summarecon: KPK Cengar Petinggi Korporasi hingga Staf Trans Jabar Tol



CIANJUR |
Harian Merdeka

Petinggi PT Summarecon Agung Tbk hingga staf PT Trans Jabar Tol dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hari ini tim penyidik memanggil lima orang sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu sore, 21 Oktober 2026.

Kelima saksi yang dipanggil, yakni Yasser Alfariasi selaku staf PT Trans Jabar Tol atau Direktur PT Bumi Banda Arsyad,

Yuliani selaku Corporate Accounting Manager PT Summarecon Agung Tbk, Yusnita Suhendra selaku Secretary to President Director at PT Summarecon Agung Tbk.

Selanjutnya, Juliandy Dasdo Pengharapan Tambun selaku Section Head Litigasi PT Summarecon Agung Tbk, dan Yahya Rudy selaku pengacara Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.

Perkara ini diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.

Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa barang bukti elektronik hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.

KPK menetapkan delapan tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, serta Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.

Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula dari dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK juga mendalami dugaan penerimaan lainnya terkait pelayanan pertanahan serta mutasi dan promosi jabatan di lingkungan ATR/BPN. ● (Egi)



Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya Bertemu, Bahas Keamanan Ibu Kota

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto bersilaturahmi dengan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di Makodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo No. 5, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (21/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan koordinasi TNI-Polri dalam mendukung keamanan, pelayanan masyarakat, serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai dinamika di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Kapolda mengatakan, komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan profesional, terukur, dan sesuai kewenangan masing-masing. Sinergi juga diperlukan untuk memastikan respons terhadap situasi yang berkembang dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

"Komunikasi dan koordinasi antara Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya harus terus dijaga. Dengan sinergi yang baik, setiap pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara terukur, profesional, dan berorientasi pada keselamatan serta pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Pertemuan juga membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan kamtibmas dan bencana, termasuk pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Koordinasi di lapangan diarahkan agar setiap langkah yang diambil tetap mengedepankan keselamatan masyarakat dan pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing institusi.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, kolaborasi TNI-Polri menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

"Dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, sinergi antarlembaga terus diperkuat agar masyarakat mendapatkan rasa aman, pelayanan yang cepat, serta respons yang tepat ketika membutuhkan bantuan," pungkasnya. ● (Egi)

Polres Serang Ringkus Pasutri Calo Tenaga Kerja PT Lung Cheong Brothers

JAKARTA |
Harian Merdeka

Pasangan suami istri (pasutri), IS (35) dan KK (28), menipu para pencari kerja dengan modus menjadi calo tenaga kerja di sebuah pabrik di wilayah Kragilan, Kabupaten Serang. Terdapat delapan orang yang menjadi korban dengan total kerugian Rp 26,4 juta.

Unit Jatanras Satreskrim Polres Serang menangkap pasutri tersebut di kediamannya di wilayah Sentul, Kragilan, pada Senin (19/10/2026). Pasutri itu dilaporkan oleh para korban yang mengaku dijanjikan bekerja di pabrik PT Lung Cheong Brothers.

“Para korban dijanjikan bisa bekerja di PT Lung Cheong Brother dengan syarat memberikan sejumlah uang. Namun, setelah uang diserahkan, pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi,” ujar Kasat Reskrim Polres Serang, Andi Kurniady, Rabu (21/10).

Dalam menjalankan aksinya, tersangka KK mengaku mampu membantu meloloskan para korban untuk bekerja di perusahaan tersebut. KK berdalih suaminya, IS, bekerja di pabrik itu dan bisa membantu proses penerimaan tenaga kerja.

Korban yang tergiur kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka. Nominal yang diberikan bervariasi, mulai Rp 1,8 juta hingga Rp 4,5 juta.

“Dari hasil penipuan yang diduga dilakukan terhadap delapan korban, kedua tersangka diketahui menerima uang dengan total mencapai Rp 26,4 juta,” kata Andi.



Setelah menunggu cukup lama, para korban tidak kunjung mendapatkan panggilan kerja ataupun kepastian mengenai pekerjaan yang dijanjikan. Para korban kemudian melapor pada 7 dan 15 Oktober 2026.

“Berebek laporan dari para korban, kami langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan penipuan tersebut. Tim Jatanras kemudian melakukan serangkaian upaya penyelidikan hingga berhasil mengamankan kedua tersangka,” jelas Andi.

Kedua tersangka selanjutnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Satreskrim Polres Serang. Polisi juga mendalami keterangan para korban serta peran tiap tersangka dalam menjalankan modus penipuan berkedok perekrutan tenaga kerja tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Diana Ardhianty

Utami, mengatakan praktik percaloan masih marak di wilayahnya.

“Polres Serang juga sudah berapa kasus yang diproses. Artinya ini kan arahnya kepada pidana kan, penipuan dan sebagainya,” kata Diana dalam keterangan terpisah di Baros, Kabupaten Serang.

Ia berharap perusahaan juga bisa meminimalkan praktik percaloan dengan mengadakan sistem rekrutmen langsung di SMK. Dengan begitu, pelamar kerja tidak terjebak dan ditipu oleh calo tenaga kerja.

“Dan kami berharap ini semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, tidak ada yang namanya pungutan-pungutan, semuanya gratis. Jadi kalau ada yang menjanjikan hal-hal tertentu di luar sana dengan iming-iming atau janji-janji, nah ini yang saya rasa perlu kami juga bekerja sama dengan Polres Serang,” ujarnya.

● (Egi)



Perkuat Program MBG, Kapolda Banten Minta Mitra Kerja Utamakan Profesionalisme

TANGERANG | Harian Merdeka

Kepolisian Daerah (Polda) Banten berkomitmen untuk terus memperkuat seluruh mitra dan person in charge (PIC) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari agar mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah hukumnya tersebut.

Kapolda Banten Irjen Pol. Hendra Kurniawan menyampaikan, pembentukan SPPG merupakan bentuk dukungan konkret institusi Polri terhadap program strategis Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pemenuhan gizi masyarakat.

“Saat ini, pembentukan SPPG di wilayah hukum Polda Banten menunjukkan perkembangan signifikan dengan hadirnya 76 titik layanan,” kata Irjen Hendra melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Rabu (21/10/2026).

Ia bilang, hingga saat ini beberapa unit masih berada dalam tahap persiapan operasional serta penyelesaian pembangunan yang membutuhkan percepatan tindak lanjut.

Kendati demikian, pihaknya meminta agar seluruh pengelola dan mitra kerja senantiasa menjaga kepercayaan publik serta nama baik institusi dengan mengedepankan profesionalisme dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Kita berupaya mendorong terbentuknya SPPG di wilayah Banten sebagai bentuk dukungan terhadap program Bapak Presiden. Alhamdulillah, upaya tersebut dapat diwujudkan melalui terbentuknya 76 titik. Karena itu, saya berharap komitmen dan semangat ini terus kita jaga agar pelaksanaan program MBG semakin optimal,” ujarnya.

Selain itu, Kapolda Banten menekankan bahwa indikator keberhasilan pengelolaan SPPG tidak hanya dinilai dari kuantitas fisik unit yang terbangun, melainkan dari kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan sasaran, aspek keamanan gizi, serta keberlanjutan program secara akuntabel. ● (Egi)

TENGKU DEWI PUTRI TEBAR PESONA

JAKARTA |
Harian Merdeka

Tengku Dewi terlihat ke pantai di Lombok. Ia tampak melamun memandangi yang ada di depannya. "From dj mode to zen mode. Ibu-ibu juga membutuhkan waktu untuk mengisi ulang energi," tulis Tengku Dewi Putri dilihat di Instagram, Kamis (22/10/2026). Tengku Dewi menginap di tempat yang tenang sebagai bagian zen mode-nya. "Kadang yang dibutuhkan itu cuma hening," tulisnya. Tengku Dewi juga gak lupa berolahraga untuk merelaksasi diri.

● (dth)



Bupati Dorong UMKM Naik Kelas, Tak Cukup Hanya Modal

TANGERANG |
Harian Merdeka

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkatkan kapasitas usaha dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu naik kelas serta bersaing di pasar yang lebih luas.

Hal tersebut disampaikan Maesyal Rasyid saat membuka Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar dan Temu Usaha Nasabah Mekaar PNM Cabang Tangerang di Aula Masjid Agung Al-Amjad, Rabu (21/10/2026).

“UMKM naik kelas itu tidak cukup hanya dari sisi permodalan, tapi juga ditentukan oleh kompetensi pelaku UMKM-nya, produk yang berkualitas dan mampu bersaing serta jangkauan pasar yang luas,” ungkap Bupati Maesyal.

Menurut Maesyal, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, dukungan terhadap pengembangan usaha perlu terus diperkuat agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta perekonomian



daerah.

“UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Maesyal juga mengajak para nasabah PNM Mekaar memanfaatkan teknologi digital, menjaga kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta mengelola keuangan usaha secara tertib dan bijak. Langkah

tersebut dinilai penting agar pelaku UMKM mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing.

“Jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk berinovasi dan kebersamaan sebagai kekuatan untuk maju bersama. Kita ingin UMKM Kabupaten Tangerang semakin mandiri, berdaya saing, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang,” katanya.

Maesyal turut mengapresiasi

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang berperan dalam pengembangan UMKM, khususnya melalui pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

“Terima kasih dan apresiasi kepada pihak PNM yang terus aktif mengembangkan UMKM, khususnya melalui pemberdayaan perempuan dan penguatan kapasitas para pelaku usaha. Semoga ini juga bisa jadi contoh bagi yang lainnya,” pungkasnya.

● (dam)

RUMAH DIJUAL
SIAP HUNI • LOKASI STRATEGIS
LT 90 m² | LB 70 m²
3 Kamar Tidur
2 Kamar Mandi
Ruang Tamu & Dapur
Lingkungan Aman & Nyaman
Area Kallidren • Jakarta Barat
SHM • Akses Kendaraan
Harga
Rp 650 Juta
(Negotiable)

RUMAH DISEWAKAN
3 Kamar Tidur
2 Kamar Mandi
Ruang Tamu & Dapur
Lingkungan Aman & Nyaman
Area Kallidren • Jakarta Barat
SHM • Akses Kendaraan
Rp 45 Juta/Tahun

TANAH/KAWLING DIJUAL
Luas mulai 100 - 500 m²
Akses jalan lebar
Lokasi strategis
SHM / Sertifikat
Harga Mulai
Rp 3,5 Juta/m²

RUKO DIJUAL
COOK UNTUK USAHA
LT 80 m² | LB 160 m²
2 Lantai
Lokasi ramai
Akses mudah
Rp 1,8 Miliar
(Negotiable)

APARTEMEN DIJUAL / DISEWAKAN
Lokasi Premium
Fasilitas Lengkap
Keamanan 24 Jam
Dekat Pusat Kota
Harga Mulai
Rp 450 Juta

MOBIL BEKAS BERKUALITAS
Toyota Avanza 2022
Automatic
Kondisi istimewa
Pajak Hidup
Slip Pakai
Rp 185 Juta

MOTOR BEKAS TERPERCAYA
Honda Beat 2023
Surat Lengkap
Kondisi Mulus
Pajak Hidup
Slip Pakai
Rp 16,5 Juta

DEALER MOBIL BARU & BEKAS
Cash & Kredit
Proses Cepat
DP Ringan
Banyak Pilihan Unit
TUKAR TAMBAH

BENGKEL MOBIL
SERVIS • SPAREPART • TUNE UP
Ganti Oli • Tune Up • Rem • AC Mobil • Kelistrikan
SERVIS CEPAT & BERGARANSI

SPAREPART & AKSESORIS MOBIL - MOTOR
Suku Cadang Original & Aftermarket
Harga Terbaik
Tersedia Berbagai Merek

JUAL BELI HP • LAPTOP • KOMPUTER
Unit Baru & Bekas
Harga Terbaik
Berjaminan
Terima Tukar Tambah

FURNITURE RUMAH & KANTOR
Sofa, Meja, Lemari, Rak, Kursi
Desain Modern & Minimalis
Custom Size & Warna
HARGA TERJANGKAU

PERCETAKAN
Ortak Berkualitas Untuk Semua Kebutuhan
Kartu Nama
Brosur
Banner
Spanduk
Stiker
Undangan
Nota, Kop Surat dan lain-lain
DESAIN GRATIS

LOWONGAN KERJA
Staff Administrasi
Sales Marketing
Kurir / Driver
Operator Produksi
Kualifikasi:
Pria/Wanita
Usia 18 - 35 tahun
Pendidikan min. SMA/SMK
Disiplin & Bertanggung Jawab

TRAVEL & WISATA
Paket Wisata Domestik & Internasional
Tiket Pesawat & Hotel
Tour Group & Private
Harga Terbaik
LIBURAN Lebih Murah Lebih Hemat

WEDDING ORGANIZER
Paket Pernikahan Lengkap
Dekorasi Modern & Elegan
Catering, Dokumentasi
Make Up & Entertainment
Wujudkan Pernikahan Impian Anda

PERALATAN RUMAH TANGGA
Harga Terbaik
Produk Original
Garansi Resmi
Banyak Pilihan

KANOPI & BAJA RINGAN
SOLUSI ATAP RUMAH ANDA
Desain Modern
kuat & Tahan Lama
Harga Terjangkau
Gratis Survey
TERIMA BORONGAN

JASA EKSPEDISI
PENGIRIMAN DALAM & LUAR KOTA
Aman
Cepat
Guru Berpengalaman
Datang ke Rumah / Online
Door to Door

LES PRIVAT
SD - SMP - SMA
Semua Mata Pelajaran
Guru Berpengalaman
Datang ke Rumah / Online
Jadwal Fleksibel

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**
Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa Tangerang 15720 Telp. (021) 5992455 Fax. (021) 5992183 Email : kab-tangerang@bptn.go.id

PENGUMUMAN
(TENTANG SERTIPKAT HILANG)
No. 222/SPN/KAB.TNG/2026

Untuk mendapatkan Sertipkat baru sebagai pengganti Sertipkat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan sebagai berikut:

No	Nama / Alamat Pemohon	Halat Atas Tanah dan Nomor Hak	CS-SU	Terdahul Atas Nama	Tanggal Pendaftaran	Tempat Pendaftaran	Keterangan
1	TAN KOK KIHANG Jl. Pajajaran Raya No. 26, RT. 083, RW. 022, Kelurahan Bojonegara, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang	M. 10056	SU 2170/1992 Tgl. 05 September 1992 Luas 160 m ²	TAN KOK KIHANG	05-09-1992	Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang	Surat Pernyataan Dikawatirkan Sampai tanggal 14 Oktober 2026 No. 222/SPN/KAB.TNG/2026 Surat Keterangan Tanah Layer Kedudukan Atas Kepemilikan Tanah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tangerang Kab. BANTEN 15720 Nomor SK/TLK/1944/VB/YAN 2.1.1/2026/SKPT Tanggal 14 Okt 2026

Dalam Waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan, dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tigapuluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipkat tersebut diatas, maka sertipkat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum, dan sertipkat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Tangerang, 21 Oktober 2026
An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang
Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Pendaftaran

Ditandatangani secara elektronik
Tunggul Cahyadi, S.SIT.,M.M.
NIP. 19720611 199203 1 001

Dokumen ini sah dan telah diandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BKR, BSKK. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai kode QR menggunakan fitur "Validasi Surat" pada aplikasi Sertifikat Tanahaku

Meliputi, Profesional, Terpercaya

Wabup Indramayu Ditahan Kejati Jabar dalam Kasus Korupsi Tunjangan DPRD

BANDUNG |
Harian Merdeka

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025. Kasus tersebut terjadi saat Syaefudin menjabat Ketua DPRD Kabupaten Indramayu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, mengatakan perkara ini bermula pada 2021 ketika Syaefudin berinisiatif menaikkan besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Indramayu.

Atas inisiatif tersebut, pagu anggaran kedua tunjangan untuk tahun anggaran 2022 dinaikkan dengan nominal yang telah ditentukan.

"Besaran tunjangan perumahan per bulan ditetapkan Rp30 juta bagi ketua, Rp28,5 juta bagi wakil ketua, dan Rp27 juta bagi anggota DPRD," kata Nur dalam keterangannya, Kamis



(22/10/2026).

Sementara itu, tunjangan transportasi ditetapkan sebesar Rp25 juta per bulan bagi ketua DPRD, Rp20 juta bagi wakil ketua, dan Rp17 juta bagi anggota DPRD.

Menurut Nur, penentuan besaran tunjangan tersebut dilakukan tanpa dokumen pendukung yang menjelaskan kebutuhan kenaikan anggaran. Penetapan itu juga dilakukan

sebelum penilaian ulang atau appraisal dilaksanakan.

Akibatnya, kebutuhan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dihitung berdasarkan nominal yang telah ditentukan Syaefudin.

Dalam proses berikutnya, Syaefudin memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu berinisial IH untuk melakukan penilaian terhadap besaran

kedua tunjangan tersebut.

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Latief, Hanif dan Rekan kemudian ditunjuk untuk mengevaluasi nilai tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD.

Namun, dalam perkembangan proses tersebut, Sekretaris DPRD berinisial AF diduga membuat surat yang ditandatangani Syaefudin selaku pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu. Surat itu dilampiri draf besaran tunjangan yang nilainya telah dinaikkan 15 persen dari hasil penilaian KJPP.

Dalam proses selanjutnya, Sekretaris DPRD diduga membuat surat yang ditandatangani oleh tersangka S selaku pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu dengan melampirkan draf besaran tunjangan yang nilainya telah dinaikkan sebesar 15 persen dari hasil penilaian KJPP Latief, Hanif dan Rekan," ujar Nur.

Dugaan penyimpangan dalam penetapan tunjangan tersebut menjadi bagian dari perkara yang kini ditangani Kejati Jawa Barat. ● (hmi)

12 Advokat PERSADIN Disumpah di Pengadilan Tinggi Banten Angkatan ke XX1V

SERANG |
Harian Merdeka

Organisasi Advokat Persatuan Advokasi Indonesia (OA PERSADIN) kembali melahirkan advokat baru di Provinsi Banten. Sebanyak 12 advokat yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) resmi dilantik sebelum mengikuti pengambilan sumpah atau janji advokat di Pengadilan Tinggi Banten.

Prosesi pelantikan 12 advokat PERSADIN angkatan ke-14 terse-

but dipimpin langsung Ketua Umum PERSADIN, Dr. KRT. Oking Ganda Miharja, di Hotel Ledian, Kota Serang, Banten, Selasa (20/10/2026)

Dalam sambutannya, Ketua Umum PERSADIN yang akrab disapa Bang Oking menyampaikan ucapan selamat kepada para advokat yang baru dilantik. Ia berpesan agar para advokat senantiasa menjaga nama baik profesi sekaligus berkontribusi dalam membesarkan organisasi PERSADIN.

"Saya ucapkan selamat kepada para advokat PERSADIN yang baru saja

dilantik. Mari kita bersama-sama tetap menjaga nama baik dan membesarkan PERSADIN. Sekali Anda menjadi advokat dan memiliki Berita Acara Sumpah (BAS) di Pengadilan Tinggi, maka selamanya Anda akan menjadi advokat," ujar Oking.

Ia juga menekankan pentingnya membangun sinergi dan solidaritas di antara sesama advokat, terutama dalam menjalankan tugas dan menghadapi berbagai persoalan hukum di lapangan.

Menurutnya, profesi advokat tidak hanya menuntut kemampuan



dan pemahaman hukum, tetapi juga integritas, tanggung jawab, serta komitmen dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Oking mengungkapkan, PERSADIN terus memperluas jangkauan organisasi di berbagai daerah. Hingga

saat ini, kepengurusan PERSADIN telah terbentuk di 25 provinsi di Indonesia. Sementara itu, para advokat PERSADIN yang telah mengikuti pengambilan sumpah atau janji di pengadilan tinggi tercatat telah mencapai 31 angkatan. ● (hed/dam)

Ubah RTRW, Bupati Serang Pastikan Keseimbangan Industri dan Lahan Pangan

SERANG |
Harian Merdeka

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang resmi mengusulkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang 2026–2046. Melalui perubahan RTRW ini, Pemkab Serang mendukung kemudahan dan kepastian hukum bagi para investor.

Selain itu, upaya ini juga dilakukan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Serang yang kemudian berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Para investor bisa mendapatkan kepastian hukum. Mereka dapat mengetahui secara jelas wilayah mana saja yang diperuntukkan bagi investasi ke depan. Peningkatan investasi tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah di Serang, Selasa (20/10/2026).



Bupati Serang memastikan, perlu ada penguatan kawasan perkotaan dan pedesaan, pengembangan kawasan industri dan logistik, hingga kawasan

pariwisata. Kemudian terjadi integrasi tata ruang itu dengan kebijakan pusat berupa lahan baku sawah menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B) dan pemanfaatan lainnya.

Penyusunan Raperda tersebut didasarkan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011–2031.

Proses tersebut juga telah memperoleh surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 18 Desember 2025.

“Pembaruan tata ruang diperlukan agar kebijakan pembangunan Kabupaten Serang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten. Selain itu, kepastian tata ruang dinilai penting untuk memberikan kejelasan kepada investor mengenai wilayah yang dapat dikembangkan,” pungkasnya.

● (Egi)

SURVEI MATRIKS

Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia, Supriyadi, mengatakan, hasil survei tersebut menempatkan Pigai dan Nusron sebagai dua menteri dengan penilaian terburuk di Kabinet Merah Putih. Berdasarkan survei Matriks Politik Indonesia, Pigai memperoleh penilaian negatif 82,6 persen, sedangkan Nusron 78,3 persen.

“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Supriyadi melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Sementara Menteri PU Dody Hanggodo menempati urutan ketiga dengan penilaian negatif 75,2 persen. Berikutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto sebesar 68,2 persen, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia 65,7 persen, dan Menteri PKP Maruarar

Sirait 60,7 persen.

Supriyadi mengatakan, Nusron memiliki tingkat popularitas 72,9 persen. Dia mengaitkan sorotan terhadap Nusron dengan pemberitaan mengenai dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang terungkap melalui operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kasus ini menyita perhatian publik, di sisi lain profil Nusron sendiri cukup dikenal sebagai politisi dan pejabat dengan rekam jejak panjang,” ujar Supriyadi.

Sementara itu, tingkat popularitas Pigai tercatat 54,3 persen. Hal itu dikarenakan Pigai menjadi salah satu menteri yang menuai kontroversi sejak awal menjabat, antara lain karena sejumlah pernyataannya dan gugatan dari pegawai di lingkungan kementerian.

Adapun Dody memiliki tingkat popularitas 27,7 persen. Hal itu dipengaruhi gaya komu-

nikasi Dody di ruang publik turut memengaruhi persepsi masyarakat. Terlebih, menteri itu juga terlibat sejumlah polemik.

Di antara menteri lain yang masuk daftar penilaian negatif, Bahlil mencatat tingkat popularitas tertinggi, yakni 85,3 persen. Sementara itu, popularitas Yandri mencapai 35,1 persen, sedangkan Maruarar 34,3 persen.

Nama lain yang masuk daftar tersebut adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan angka 55,3 persen, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 50,7 persen, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini 45,5 persen, serta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 40,3 persen.

Survei itu juga menunjukkan bahwa perombakan Kabinet Merah Putih belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Sebanyak 52,4 persen responden menyatakan tidak puas

terhadap perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo. Sementara itu, 41,3 persen menyatakan puas dan 6,3 persen lainnya tidak menjawab atau tidak tahu.

Supriyadi mengatakan, alasan yang paling banyak disampaikan responden terkait perlunya pergantian menteri adalah kinerja yang dinilai kurang memuaskan, dengan angka 45 persen. Alasan berikutnya adalah pernyataan dan sikap kontroversial sebesar 31,1 persen, keterlibatan dalam perkara hukum 10 persen, serta penempatan yang dinilai tidak sesuai 6,3 persen.

Survei Matriks Politik Indonesia dilaksanakan pada 10-15 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling dan diklaim mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Survei tersebut memiliki margin of error sebesar sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. ● (Egi)

Como Vs MU : MALAM SPESIAL NICO PAZ

JAKARTA |
Harian Merdeka

Menjadi bintang kemenangan Como 1907 atas Manchester United di Liga Champions. Gelandang serang Argentina itu tampil bak Lionel Messi.

Como menjamu MU di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Rabu (21/10) malam WIB. I Lariani menang 4-1, dengan Nico Paz memborong dua gol dan satu assist.

Nico Paz membuka keunggulan Como sejak menit ke-2, lewat sepakan indah kaki kirinya. Kemudian, ia mengkreasi gol kedua Como yang dicetak Anastasios Douvikas, sebelum gelandang 22 tahun itu menambahkan golnya di menit ke-57.

Satu gol terakhir Como kemudian dicetak Jacobo Ramon, yang kemudian diperkecil MU lewat aksi Joshua Zirkzee.

Bagi Nico Paz, torehan dua gol dan satu assist-nya membuahkkan catatan manis. Opta menyebut, jebolan Real Madrid itu menjadi pemain Argentina termuda kedua yang bisa berkontribusi tiga gol di pertandingan Liga Champions.

Nico Paz melakukannya pada usia 22 tahun 43 hari. Ia hanya kalah dari Lionel Messi, yang pernah berkontribusi serupa di Liga Champions dalam usia 21 tahun. Messi melakukannya saat melawan Bayern Munich.

Nico Paz memang digadang-gadang bakal menjadi pewaris Messi di Timnas Argentina. La Pulga baru saja pensiun, dan nomor 10 miliknya disebut-sebut bakal diwariskan kepadanya.

Saat melawan MU, Nico Paz juga mendapat rating hampir sempurna dari Sofascore. Ia diberi nilai 9.9 usai bikin 4 tem-

bakan yang semuanya on target, bikin satu assist dan chance, hingga membantu pertahanan dengan tekel 100 persen berhasil dari dua percobaan.

Total musim ini, Nico Paz sudah berkontribusi lima gol dari 3 laga di Liga Champions. Tiga kontribusinya berupa assist, dua di antaranya ia cetak saat menggulung RB Leipzig di matchday pertama.

"Ini adalah salah satu malam paling istimewa dalam hidup dan karier saya, baik bagi saya maupun bagi klub. Malam ini sungguh bersejarah karena kami bertanding

melawan salah satu klub terbaik sepanjang masa, dan bisa meraih hasil ini di kandang sendiri sungguh luar biasa. Kami sangat puas dengan penampilan kami," kata Nico Paz, di situs resmi klub.

"Saya merasa sangat nyaman di lapangan. Saya sangat menikmati pertandingan ini. Saya dikelilingi oleh rekan-rekan setim yang luar biasa, dan hal itu memungkinkan saya untuk bermain sesuai gaya saya. Saya sangat senang bisa bermain di tim ini, juga berkat staf yang memberikan saya banyak kepercayaan diri," kata Nico Paz.

Hasil ini membuat Manchester United terlempar ke peringkat 23 dengan baru mengemas 3 poin. Sementara Como 1907 berada di peringkat 10 dengan 6 poin. ● (dts)



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN **MERDEKA**
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp50.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**

